

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

UU Nomor 32 Tahun 2004 menerangkan, penerapan kebijakan otonomi daerah berarti bahwa pemerintah mengelola pemerintahan secara mandiri dengan transparansi dan pertanggungjawaban. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama masyarakat guna mengetahui pengelolaan keuangan daerah berjalan baik. Untuk mendapatkan otonomi dari pemerintah pusat, beberapa bidang telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Diantaranya kebijakan proses mengelola keuangan daerah. Pada sistem akuntansi pemerintah dibentuk entitas dan entitas akuntansi yang melaksanakan sistem akuntansi adalah pemerintah daerah. Tujuan khusus keberadaan perubahan kebijaksanaan proses mengelola keuangan dimaksudkan guna pelaksanaan pemerintahan yang baik bagus dan bersih, bertujuan pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas dan menyusun laporan keuangan yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan.

Reformasi di berbagai Negara khususnya Indonesia juga berpengaruh pada perkembangan akuntansi sektor publik. Tuntutan agar pemerintah dapat beroperasi secara profesional dan efisien adalah kesadaran bagi semua pihak, terutama aparat pemerintah untuk selalu memenuhi tuntutan lingkungan dengan berusaha memberikan layanan terbaik secara terbuka dan bertanggung jawab (Tanjung, 2017). Pemerintah menghadapi banyak tantangan, baik secara internal dalam hal kinerja yang lebih baik maupun secara eksternal, dalam hal

tuntutan masyarakat sebagai konsekuensi dari terwujudnya otonomi daerah yang mengutamakan akuntabilitas untuk efisiensi dan peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, pemerintah daerah terus melaksanakan usaha guna mengembangkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah. Pelaporan keuangan ialah salah satu cara bagi suatu entitas, yang dimaksud ialah pemerintah, guna melaporkan keuangannya terhadap masyarakat. Pemerintah wajib sanggup menunjukkan keuangan dengan informasi yang berkualitas. Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap *good governance* kian memacu pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna melaksanakan akuntabilitas masyarakat. Dalam rangka tercapainya *good governance*, pemerintah daerah perlu terus melaksanakan usaha peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan tahunan adalah sarana untuk suatu entitas dengan arti itu tanggung jawab pemerintah kinerja keuangan terhadap publik. Pemerintah harus sanggup menyajikan informasi keuangan dengan cara yang dapat diandalkan.

Pada standar akuntansi pemerintah menerangkan bahwa laporan keuangan yang memiliki kualitas wajib melengkapi karakteristik agar sesuai, andal, sebanding, dan bisa dimengerti. Penyusunan laporan keuangan berlandaskan standar akuntansi pemerintah sebenarnya yaitu demi meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah, sehingga laporan keuangan dan kemampuan bekerja pemerintah yang terkait bisa menciptakan keterbukaan dan

pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Upaya guna mengembangkan kualitas laporan keuangan Standar Akuntansi Pemerintah menjadi syarat yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga sangat penting diterapkan dengan adanya Aturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah ialah asas akuntansi yang digunakan pemerintah ketika menyusun dan menyediakan laporan keuangannya. Prinsip-prinsip maksudnya adalah dasar akuntansi, biaya historis, realisasi, substansi atas bentuk, periodisitas, pengungkapan lengkap yang konsisten dan penyajian wajar. Kualitas pelaporan keuangan pemerintah erat kaitannya dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) karena harus dikembangkan sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada pada standar akuntansi yang berlaku. Oleh sebab itu, LKPD harus berdasar pada SAP yang diterapkan. SAP dapat digunakan sebagai landasan apakah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dibentuk selaras dengan sistem yang tepat dan apakah informasi yang terkandung di dalamnya telah selaras dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sistem Pengendalian Intern juga menjadi sebagian penyebab yang berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Sesuai dengan tujuannya guna memberikan rasa yakin yang cukup atas pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, penjagaan asset Negara dan kepatuhan pada aturan undang-undang. Sebagian besar implementasi yang tidak tepat dari Sistem cara mengendalikan Internal bisa berimbas pada kualitas laporan keuangan daerah. Oleh sebab itu, sistem pengendalian internal

merupakan bagian yang terpenting dan diperlukan dari suatu daerah atau perusahaan untuk menjaga kekeayaan daerah tersebut. Sistem pengendalian intern menjadi salah satu faktor penting keandalan laporan keuangan yang diperoleh oleh suatu daerah.

Sistem informasi akuntansi juga berpengaruh bagi kualitas laporan keuangan, dimana laporan keuangan disusun berdasarkan input yang baik, proses yang baik dan hasil yang baik, Sistem Informasi Akuntansi adalah komponen atau substansi dari sebuah organisasi yang bertanggung jawab menyiapkan berita keuangan untuk memudahkan manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan. Sistem informasi akuntansi didesain oleh sebuah organisasi maupun lembaga untuk bisa menjalankan fungsinya yakni menyediakan informasi akuntansi yang sesuai, andal, bisa dibandingkan dan dimengerti (Zulfah et al., 2017). Sinergi dari pemerintah dalam mengelolah informasi secara efektif sangat penting karena dapat menjadi dasar dari tata kelola pemerintah yang baik.

Beberapa penelitian terdahulu juga telah melaksanakan penelitian mengenai unsur yang berefek terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Menurut penelitian (Jauhari et al., 2021) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh baik bagi Kualitas Laporan Keuangan sedangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tak memoderisasi pengaruh antara standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah pada kualitas laporan keuangan. Menurut (Rohman et al., 2020) menyimpulkan bahwa Pengertian Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP), Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem cara mengendalikan Internal secara simultan dan parsial memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Penelitian (Dasmaran et al., 2018) menerangkan hasil bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Penelitian (Nurhasanah et al., 2018) menyatakan bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh secara simultan pada kualitas laporan keuangan namun pengendalian internal tak berpengaruh secara parsial pada kualitas laporan keuangan. Serta penelitian (Lestari & Dewi, 2020) menyimpulkan hasil bahwa pengertian terkait akuntansi, pendayagunaan sistem informasi akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal memberikan imbas positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masing-masing tahunnya akan mendapatkan penilaian berbentuk opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK adalah pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai kesimpulan BPK terkait tingkatan kenormalan informasi yang disediakan pada laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengenai pengecekan cara mengelola dan tanggung jawab Keuangan Negara ada empat bentuk opini BPK diantaranya Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), Tak Wajar (Adverse Opinion), dan Tidak Memberi Pendapat (Disclaimer Of Opinion). Ketika Opini BPK sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Daerah (LKPD),

maka dianggap laporan keuangan yang sudah bebas dari kesalahan saji material. Secara tersirat urutan pada klasifikasi opini diatas dapat menjadi refleksi stratifikasi kualitas kewajaran atas laporan keuangan dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja pemerintah yang memuaskan.

Pemilihan Kabupaten Manggarai Timur sesuai hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2015, 2016, 2017 mendapatkan Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Perkara ini terlihat bahwa LKPD Kabupaten Manggarai Timur belum disediakan secara wajar dan berkualitas sebab masih terdapat beberapa akun dan pos yang masih belum disediakan dan berkualitas. Sedangkan dilihat dari tahun 2018 sampai tahun 2020 menunjukkan peningkatan dengan mendapatkan opini BPK meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, pencapaian keberhasilan pemerintah daerah mendapatkan opini WTP tentunya ada beberapa hal yang di rekomendasikan BPK sebagai masukan untuk upaya peningkatan dan perbaikan yang akan dilakukan. Peningkatkan capaian dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tentunya ada perbaikan atas catatan dan kelemahan-kelemahan dari kualitas laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian WTP yang dicapai akan lebih berkualitas jika adanya temuan dan catatan dalam beberapa permasalahan yang ada. Meski mendapat status opini WTP pada LKPD kabupaten Manggarai Timur masih ada beberapa catatan dan rekomendasi dari BPK. Hal itu perlu menjadi perhatian dari pemerintah yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu di

Kabupaten Manggarai Timur terdapat pencatatan dan pelaporan aset yang belum jelas dan penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib.

Berdasarkan pandangan diatas mengarah pada kesimpulan bahwa kualitas audit adalah semua kemampuan yang dimiliki seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan klien dan mengungkap pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, memiliki wewenang untuk melaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit, dan merupakan dipandu oleh standar audit. Oleh karena itu, peningkatan kualitas audit sangat penting bagi auditor untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap keakuratan dan keabsahan laporan keuangan yang telah diaudit. Ketika kualitas auditor rendah, kecurangan dapat terjadi selama audit laporan keuangan.

Dalam Sistem Pengendalian Intern juga masih kurang maksimal dikarenakan tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang masih rendah. Adapun ditemukan pengawasan internal yang masih rendah hal ini menyroti kelemahan SPIP yang memiliki efek domino pada proses akuntansi dimana pemerintah juga masih kurang maksimal dalam tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan seperti penyajian akun asset lancar selain kas dan asset tetap tidak sesuai SAP. Masih adanya kepincangan yang ditemukan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya penempatan pegawai belum sesuai dengan bidangnya. Pada bidang keuangan juga wajib dipenuhi sumber daya manusia yang mempunyai kesmampuan untuk mengerti akuntansi dan berbagai ilmu terkait dengan pengelolaan keuangan. Pemahaman terhadap penggunaan sistem

informasi akuntansi yang disediakan adalah suatu kebutuhan yang harus terpenuhi, agar membantu dalam pengolahan data yang cepat, efektif dan efisien. Salah satu faktor yang memberikan pengaruh pada kualitas laporan keuangan ialah Sistem informasi Akuntansi.

Sesuai dengan fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya memenuhi persyaratan/karakteristik. Berlandaskan karakteristik kualitatif, oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan terutama dalam melakukan inventarisasi aset tetap dan mencatat laporan inventarisasi aset, pengawasan internal inspektorat daerah dalam kepatuhan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan serta penempatan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi akuntansi pada pegawai pemerintah daerah agar dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang bermanfaat dan valid.

Peneliti berminat untuk meneliti lebih jauh faktor-faktor yang memiliki memberikan pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan meneliti variabel yang dipakai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Fokus penelitian ini dilakukan pada kantor BPKAD. Alasan memilih lokasi penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) karena memiliki peranan, tanggung jawab yang sangat penting dalam menunjang urusan pemerintahan dalam hal melakukan rekonsiliasi laporan keuangan seluruh SKPD dalam wilayah kabupaten baik

dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan serta menjalankan fungsi pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Berdasarkan uraian diatas sehingga penelitian ini dilaksanakan untuk mereplikasi penelitian sebelum-sebelumnya yang dilaksanakan oleh Dasmaran dkk. (2018) terkait “Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah dalam BPKAD Pandeglang”, namun diterapkan pada objek yang tidak sama dengan memberikan tambahan pada variabel Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Peneliti juga ingin melihat konsistensi dari penelitian yang dilaksanakan sebelumnya Daasmaran dkk. (2018) jika obyek yang dipakai adalah BPKAD Kabupaten Manggarai Timur.

1.2.Rumusan Masalah

Berlandaskan opini dari BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengalami peningkatan selama tahun 2018 hingga tahun 2020 dengan pencapaian yang diperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akan Tetapi pencapaian keberhasilan tersebut tidak terlepas bahwa laporan keuangan pemerintah Manggarai Timur bebas dari catatan dan kesalahan. Penilaian WTP yang diperoleh terdapat beberapa catatan dan perbaikan yang menjadi perhatian pemerintah daerah Manggarai Timur. Diantaranya pencatatan dan pelaporan asset tetap yang belum jelas, panatausahaan asset tetap belum sepenuhnya tertib, kesesuaian dalam penyampaian laporan keuangan seperti penyajian akun asset lancar selain kas dan asset tetap tidak sesuai dengan SAP, masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah, ketepatan dan ketidapatuhan dalam

pendataan asset, serta kemampuan sumber daya manusia yang memahami mengenai ilmu akuntansi.

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh penelitian sebelumnya memberikan pernyataan unsur-unsur yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pada penelitian ini terdapat bermacam faktor yang berpengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah. Faktor pertama, standar akuntansi pemerintah (Dasmawan, 2018 ; Nurhasanah, 2018). Faktor kedua yaitu, sistem informasi akuntansi (Nurhasanah, 2018 ; Rohmah, 2020). Dan faktor ketiga yaitu, sistem pengendalian internal (Jauhari, 2021 ; Lestari, 2018).

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan ada beberapa variasi hasil dari penelitian sebelumnya yang ditemukan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Dasmawan dkk. (2018) mengemukakan hasil bahwa standar akuntansi pemerintah memunculkan pengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Nurhasanah dkk. (2018) dan Rohmah dkk. (2020) menyatakan hasil standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian Jauhari dkk. (2021) dan Nurhasanah dkk. (2018) memberikan pernyataan bahwa sistem pengendalian internal tak memunculkan pengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah.

Berlandaskan pemaparan latar belakang diatas, pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana dibawah ini:

- a. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh bagi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur?

- b. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur?
- c. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur?



1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini guna memberikan uji faktor-faktor yang memberikan pengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Timur terhadap Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

1.4. Manfaat Penelitian

Diharap penelitian ini bisa memberi paradigma baru untuk pihak-pihak terkait dalam permasalahan yang diteliti diantaranya:

1.4.1. Kontribusi Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa berguna, yakni menambah wawasan baru, sumbangsih ilmu dan pemahaman baru terait penelitian tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada kualitas laporan keuangan daerah.

1.4.2. Kontribusi Praktik

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu guna mengembangkan kualitas laporan keuangan daerah dengan mempertimbangkan unsur-unsur variabel yang dipakai pada penelitian ini. Untuk peneliti kemudian, penelitian ini bakal menjadi bahan referensi dan informasi bagi peneliti guna melakukan penelitian dengan menggunakan judul yang sama dengan penelitian ini.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini ada 5 (lima) bab, yakni:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kebermanfaatan penelitian, dan susunan penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian, termasuk teori pendukung, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III Metodologi Penelitian

Berisi tentang penjelasan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian mencakupi objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan populasi dan sampel, pengujian instrument, variabel penelitian dan teknik analisa data.

BAB IV Hasil Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai hasil dari menganalisis dan pengolahan data dengan pengujian jawaban terhadap responden dari kuisioner yang dibagikan dan didapatkan oleh peneliti.

BAB V Penutup

Bab ini memuat tentang kesimpulan sesuai dengan hasil analisis data yang sudah diolah, saran yang akan diberikan oleh peneliti pada pihak yang berkepentingan dan menjelaskan mengenai ketaatan dalam penelitian yang sudah dilaksanakan.